

# Memberdayakan Komunitas Basis\*

Glen A. Lewandowski

3

**Abstract:** The ideal of community is found in the Bible, where Luke in Act describes *koinonia* as a social reality in which sharing of goods becomes its significant value, where Paul in his letters gives a *mistico-spiritual* dimension on community as participation in the mystery of God in Jesus Christ. The Bible does not hide difficulties and struggles to make down-earth that ideal. The recent movement to revive community comes from the spirit of *aggiornamento* of Gaudium et Spes in which Church is conscious her existence in the world and her mission to give testimony of justice and human dignity. Pragmatically, this article offers six criteria, borrowed from sociology of institution, that functions to help building a living community; pastorally, it opens a new horizon in considering the way of doing pastoral based on parish on the one side and on basic community, on the other.

**Keywords:** komunitas basis • gereja • *ad extra* • masyarakat • kebutuhan terasa • moral • pemberdayaan •

Dalam pertemuan nasional untuk merayakan millenium ketiga, diadakan sidang agung para uskup dan sekian wakil dari setiap keuskupan se-Indonesia untuk membahas tema pokok Pemberdayaan Komunitas Basis. Dalam pertemuan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2000 itu ditetapkan bahwa akan dibuat *follow-up* di tingkat regional dan juga pada level keuskupan masing-masing. Pertemuan di Jayapura untuk provinsi gerejani Papua dimaksudkan sebagai salah satu

---

\* Tulisan ini pernah disampaikan dalam pertemuan para Uskup dan para delegatus sosial dan delegatus pastoral se-Provinsi Gerejawi Papua. Naskah ini telah diedit oleh redaktur dengan mengubah cara penulisan daftar rujukan sesuai dengan ketentuan *Limn*, namun tetap mempertahankan cara penulisan catatan kaki yang digunakan penulis.

*follow-up* tersebut. Maka dalam makalah ini kami membicarakan pemberdayaan komunitas basis yang disoroti dari dua segi, yakni pendekatan teologis dan sosiologis.

Dalam bagian pertama, kami mengutarakan komunitas basis dengan sorotan teologis (biblis dan eklesiologis); dan dalam bagian kedua disajikan pendekatan kesadaran modern akan kepentingan ilmu kemanusiaan. Pada bagian ketiga, dikedepankan ilmu sosial sebagai alat tafsir untuk mengerti komunitas basis dan tantangan untuk mengembangkannya, secara khusus keadaan sosio-budaya. Dalam bagian terakhir, kami mengedepankan soal pemberdayaan, suatu soal praktika,<sup>1</sup> soal pastoral, soal “mau ke mana”. Namun, kami membatasi diri pada masalah kriteria, terutama kriteria ilmu sosiologi pelembagaan,<sup>2</sup> yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu gerakan dinamis dapat bertahan,<sup>3</sup> hingga menjadi pranata sosial, yakni dalam hal ini, komunitas basis. Kriteria diharapkan ditafsirkan secara dinamis dan luwes juga. Pada soal praktik pastoral juga, kami coba mempertemukan masalah pengorganisasian Gereja pada tradisi parokial-(katedral) dengan pendobrakan komunitas basis dewasa ini.

### **Komunitas Basis: Segi Teologis**

**Gereja koinonia.** Dalam Kisah Para Rasul, cuma sekali saja muncul istilah “*koinonia*” (Kis 2.42). Lukas, memakai istilah yang sudah ada secara tradisional dan memolesnya secara rapi dan tersusun, menggambarkan *koinonia* sebagai salah satu dari empat hal yang ditekuni dalam jemaah bahari di Yerusalem.<sup>4</sup> Mereka semua yang beriman menekuni ajaran para rasul (*didakhé*), mereka menekuni persekutuan (*koinônia*), mereka menekuni pemecahan roti (*klasei tou artou*), dan mereka menekuni jam-jam kanonik doa resmi yang terjadwal (*proseukhais*). *Koinonia* dikembangkan selanjutnya dalam bab ke-4 sebagai milik bersama (*koinos*) serta pembagian harta di antara mereka sesuai dengan keperluan anggota komunitas. *Koinonia* rasuli ini, walaupun tidak terlalu dikaitkan dengan liturgi dalam dirinya sendiri, namun karena dikaitkan dengan unsur pemecahan roti dan acara kanonik untuk doa-doa, maka tidak terpisah dari liturgi juga. Namun, *koinonia* lebih menjurus pada suatu nilai sosial, hubungan antar-manusia daripada komunio liturgis dan unio dengan Allah, sang Esa.

---

<sup>1</sup> Lobkowicz, “The Myth of Self-Determination,” 123-139.

<sup>2</sup> Bellah, “We live through Institutions,” 3-18.

<sup>3</sup> Bellah, “Institutions as Patterned Ways of Living Together,” 4-5; Feibleman, “Leading Institutions.” 1956.

<sup>4</sup> Thronton, L.S.

Dalam surat-surat Paulus, *koinonia* mistik<sup>5</sup> justru mendapat tekanan yang lebih khusus. *Koinonia* diartikan sebagai partisipasi dalam Roh Kudus (II Kor 13.13), dan partisipasi dalam Kristus (I Kor 1.9, Fil. 3.10). *Koinonia* dalam Tubuh Kristus (I Kor 10.17) mempersemangatkan interaksi antar-pribadi, sehingga dimensi interioritas dan spiritual-mistik kiranya ditekankan oleh Paulus, sebagai motivasi untuk menghayati hidup sosio-personal, secara lebih mendalam dan jauh lebih mengikat: "Maka kita sekalipun banyak (*polloi*), adalah satu (*hen*) tubuh, karena kita semua (*pantes*) mendapat bagian (*methexis*) dalam roti yang satu (*henos*) itu". *Koinonia* melalui Roh dan Tuhan menjadi pra-sarana untuk berkomunio, berpartisipasi dalam kodrat Allah (bdk. II Pet 1.4).<sup>6</sup> Jadi, bagi Paulus, *koinonia* pertama-tama kiranya bukanlah suatu sosietas insani, hubungan antar-pribadi, suatu RT orang-orang religius, yang direstui oleh Allah dengan berkat dan senyumannya. *Koinonia* dengan Allah mengarahkan orang kepada pemenuhan tujuan hidupnya: kebebasan, cinta keadilan, dan solidaritas dengan proyek Allah bagi dunianya.

Jemaat-jemaat bahari ditata dan diorganisir melalui rumah atau paguyuban rumah tangga. Gereja-gereja rumah (*house churches*) dibentuk melalui ikatan orang-orang seiman dan (seringkali) se-suku.<sup>7</sup> Kelompok suku Yahudi pun tidak bisa mempersatukan semua orang Yahudi perantauan dengan orang Yahudi setempat (di Yerusalem). Malahan secara terlalu halus sekali – Lukas sendiri menunjukkan bahwa justru para rasul di Yerusalem lah yang mengakibatkan ketidakpuasan kaum Hellenis, karena cara mereka (yang kurang "piawai") dalam membagi-bagikan jatah beras kepada janda-janda. Dengan memaafkan secara halus para rasul dari tugas 'melayani meja' dan menekuni doa dan ajaran injil, maka tersirat dalam laporan Lukas bahwa justru sukuisme/lokalisme dipraktekkan pun oleh rasul sendiri (Kis 6.2). rupanya para rasul pun harus belajar dari kritik terhadap "pelayanan serong" mereka, dari salah kiprah pembaktian mereka, dari protes orang yang disingkirkan, dan dari ketegangan antara golongan. Gereja purba bukan kebun puspa mawar tanpa duri. Dengan kata lain, Gereja purba pun bukan kelompok berkomunio serba bagus (misalkan Kis 2.42) pada mulanya, melainkan harus belajar menekuni (*proskarterountes*) komunio demi mewujudkan *koinonia* dari gesekan antar-insani dan kertakan gigi serta seringai terbalik. Selain situasi historis aktual,<sup>8</sup> kita bisa tambahkan pula bahwa laporan (y.i., sejarah tertulis) Gereja yang diberikan oleh Santo Lukas kiranya membungkus ceritera kenyataan agak lain

---

<sup>5</sup> Jacobs, *passim*.

<sup>6</sup> Partisipasi dalam kodrat Allah merupakan tema sentral dari tradisi mistik Gereja. Lih. Bell, "Participation, Image, and Likeness," 89.

<sup>7</sup> Meek, "The Language of Belonging," 85-94.

<sup>8</sup> Haenchen, *passim*.

sedikit daripada laporan kring Santo Stefanus, Kota Raja Daud. Laporan, seturut ideologi Lukas, jangan-jangan terlalu menyikapkan retak-retakan di dalam idealisme Gereja purba. Sedangkan kring Santo Stefanus dongkol betul.<sup>9</sup> Kita memiliki laporan Lukas.

Jadi, jika Gereja ditata berdasar pada struktur rumah dan paguyuban rumah tangga, maka kesulitan dan tantangan “paguyuban Gereja” mirip juga dengan jenis-jenis konflik-konflik antar-pribadi dan antar-golongan tetangga.<sup>10</sup> Para rasul dan para kudus purbakala juga tidak luput dari kesulitan hidup bersama dalam *koinonia*, dari kesulitan mengimbangi interes-teres pribadi dan bersama (Kis 5.2,1 Kor. 11.22), dari kebekuan kerikil keras para kepala batu, pribadi-pribadi yang sulit (Kis 9.13 & 26).

Biarpun kenyataan historis tidak bisa dipungkiri, namun idealisme Gereja purba dan nilai-nilai adiluhur selalu – sampai sekarang juga – ditonjolkan bagi citra hidup bersama dalam Kristus. Hidup baru dan segar selalu merupakan undangan dan himbauan agar diwujudkan-nyatakan (I Kor 11.34). Hidup dalam persekutuan ideal yang diidamkan dalam Kitab Suci memang penuh kedamaian, kerja sama, gotong royong, *sharing*, partisipasi, hormat timbal balik, keakraban, dan otonomi swa-tantra seperlunya, yakni, pemberdayaan untuk memecahkan soal sendiri.

Pada Konsili Vatikan II model Gereja sebagai paguyuban (*koinonia*) mendapat angin baru lagi. Pola eklesiologi semenjak Konsili Vatikan I, pada zaman timbulnya negara-negara baru dan semangat nasionalisme dan sosialisme serta ekonomi industrial dan kapitalistis liberal, ditelorkan suatu eklesiologi yang juga menekankan Gereja selaku “*societas perfecta*” setingkat dengan dan sama berdaulat atas warganya (sekurangnya secara rohani dan moral) seperti terdapat di sosietas negara ‘lainnya’. Gereja institusional menjadi mahir sekali sebagai<sup>11</sup>, pembagi proyek yang lebih hebat daripada pemerintah manapun, dan pranata keselamatan sosio-ekonomis handal. Sekolahnya hebat. Rumah sakitnya terpercaya. Santrinya efektif melawan kemiskinan kota dan mengentaskan kaum sampah pinggir kota. Pahlawan Gereja modern adalah individu tersohor. Gereja terlembaga<sup>12</sup> tetap berbangga betul akan para anggota yang “jadi orang” dalam masyarakat modern, sampai sekarang.

**Komunitas basis.** Komunitas basis pola *koinonia* ditelorkan dari visi Gereja akan komunitas/*communio*. Komunitas basis pola *sosial* ditelorkan dari visi Gereja sebagai ragi dan garam dunia. Magnis-Suseno mengaitkan distingsi

<sup>9</sup> Hengel, “The Hellenists and their Expulsion from Jerusalem,” 1985, 71-80.

<sup>10</sup> Meek, “Controlling Individual Deviance,” 127-131.

<sup>11</sup> Weber, “Technical Advantages of Bureaucratic Organization,” 214-216.

<sup>12</sup> Bellah, “Institutions in Sociology and Public Practice,” 287-306.

*communio/ragi* ini, sebagai tekanan yang membedakan antara misi Gereja *ad intra* (ke dalam) dan misi Gereja *ad extra* (ke luar). Tugas Gereja *ad intra* adalah untuk mewujudkan persekutuan, persaudaraan, kasih cinta, dan pengakuan akan orang-perorangan. Komunitas basis, yang bersifat kekerabatan, jauh lebih mudah menggambarkan dan mengaktualkan kabar gembira yang mengena karena tergantung pada dinamika inter-personal, hangat, akrab dan interese untuk saling kenal. Dalam perspektif ini dan secara cukup apriori, maka “organisasi besar” (y.i. sosietas, masyarakat, lembaga<sup>13</sup> birokrasi) dianggap agak bermusuhan dengan kekeluargaan, relasi tatap muka, dinamika antar pribadi, dan persahabatan-persaudaraan. Gereja sosietas (institusional) adalah impersonal, katanya. Kecil itu indah. Besar itu jelek. Raksasa itu bengis: seperti negara adikuasa, penjajah, “pusat”, dan “*top-down*” pemerintahan. Kata-kata kesayangan adalah “*grass roots*”, “akar”, basis, *bottom-up*, kebutuhan terasa, dan dari rakyat sendiri. Pola unggul adalah komunitas (*Gemeinschaft*). Magnis-Suseno tidak menggunakan pengkotakan hitam-putih demikian. Dia lebih menekankan bahwa interese “*ad intra*” mencakup salah satu nilai positif dari gerakan perwujudan dan pengembangan Gereja.

Menurut Magnis-Suseno Gereja *ad extra* mencakup *environment*, agama-agama lain, perutusan pewartaan, dan kaum miskin yang mengalami ketidakadilan. Pola komunitas basis demikian berorientasi ke luar, yang bersedian dengan “raksasa” masyarakat (dan Gereja hirarkis), lebih condong kepada “tetangga” dan “sesama” manusia dalam arti masyarakat yang luas. Gereja *ad extra* mencakup ufuk komunitas basis hidup (bersama) seluruh umat manusia, seluruh kepentingan bersama (*bonum commune*<sup>14</sup>), termasuk situasi ekonomi, politik, dan pola interaksional kemasyarakatan. “Isyu” klasik sosiologi seperti perang, terorisme, permusuhan, kemudaratatan, peningkatan ekonomi rumah tangga, pasar kerja, pengangguran, industrialisasi, urbanisasi, kaum buruh, kaum tunawisma, keanoniman pribadi di dalam dunia modern, sistem pendidikan, kesetaraan gender, nasib anak dan kaum perempuan, kesehatan dan gizi, serta peran politik terhadap hidup bermasyarakat: pendek kata “keduniaan” mencakup agenda komunitas basis ragi. Komunitas basis yang diorganisir demi tujuan “memasyarakat” tidak tinggal diam dalam kenyamanan persekutuan dan persaudaraan, dukungan dan nikmat persahabatan, melainkan mengatur hidupnya dan hidup bersama demi perutusan bersama ke dalam “dunia”. Jenis tata organisasi komunitas basis ragi jauh lebih terfokus dan bertujuan. “Agenda” dianggap penting. Kita WAJIB BERBUAT apa? Analisis sosial, pertimbangan kemungkinan, dan keputusan menggambarkan dan menjurus kepada “*actio*” dari apa yang harus ditindak-lanjuti. Karena itu,

<sup>13</sup> Bellah, “Institutional Responsibility in Practice,” 12-16.

<sup>14</sup> Lippmann, “Kepentingan Umum,” 43.

komunitas basis ragi demikian sering kelihatan sebagai kelompok yang disadarkan akan perannya sendiri. Jenis kelompok basis ini lebih mirip dengan “sel masyarakat”, “unit sosietas”, “kelompok kategorial berdasarkan satu-dua interse yang dikejar bersama”. Biasanya kelompok basis ragi masyarakat demikian tidak dimaksudkan menggantikan komunitas (yakni, rasa bersama pada komunio keluarga besar) melainkan justru “ke luar” dari kesatuan akrab-komunio, demi dunia luar. Namun jelas juga ada rasa solidaritas tinggi dan dukungan, namun lebih demi tujuan final. Akan tetapi, bila tujuan sudah tercapai, kelompok ber-*goal* mengalami krisis identitas. “Apakah komunitas masih perlu? Manakah agenda berikutnya? Sehingga masih ada alasan untuk tetap ada (*raison d’être*)”.

Ketegangan sehat antara kedua pola komunitas basis *ad intra* dan *ad extra* menandai tantangan yang di hadapi Gereja dewasa ini. Apakah pola “bertetangga” dan “kekeluargaan” lebih penting – demi menunjang kesetaraan, persekutuan dan persaudaraan? Ataukah perubahan, reformasi, pembangunan, dan penanggulangan ketidakadilan lah yang selayaknya mendapat prioritas dan investasi energi Gereja. Pendek kata, pemberdayaan menjurus ke mana? Sampai sekarang ini, terkesan bahwa pastor-pastor menekankan “persekutuan” *koinonia* keakraban, sedangkan Delegatus Sosial dan pimpinan Gereja, terkadang juga kaum awam yang *social-minded*, menekankan “pengubahan struktur kebiasaan yang tidak tepat”. Dua model hidup menggereja tidak harus dipertentangkan (umpamanya, lihat saja model pengaitannya dari Magnis-Suseno), namun jelas agenda dan *scope* permasalahannya berbeda. Sebagai contoh, Gereja Filipina, mengupayakan kelompok basis sebagai program pembinaan persaudaraan, cintakasih, dan rasa kebersamaan. Sedangkan Gereja Amerika Selatan menekankan komunitas basis sebagai kader pijakan untuk mengatasi “dosa dunia”. Maka pilihan untuk salah satu model bukanlah pertama-tama pilihan, melainkan kecondongan, kebudayaan, lebih daripada suatu proses “*discernment* dan pilihan” rasional. Bagaimana dengan Indonesia? Ke mana arah pemberdayaannya?

## **Komunitas Basis: Pola Perubahan Sosial**

### ***Res Publica/Res Privata***

Ilmu sosiologi berkembang sejak Revolusi Prancis. Tentu saja Filsafat Republik Plato sudah lebih lama membahas “urusan masyarakat publik”, namun dengan adanya Revolusi Prancis, ilmu sosial berkiblat kepada masalah umum sebagai masyarakat senasib dengan nasional.<sup>15</sup> Dalam pendekatan sosiologi pada struktur-struktur besar, terutama struktur nasional negara, maka ilmu sosial komunio menjadi kepedulian *res privata*, sosiologi mikro. Keluarga, terutama,

---

<sup>15</sup> Lippmann, “Memudarnya Filsafat Publik,” 108.

menyusul sekolah dan lembaga kesehatan, semua dicakup oleh *res privata*. Sedangkan pemerintahan, ekonomi, keamanan, dan infrastruktur lintas wilayah (air, jalan, energi, dlsb.) berurusan dengan *res publica*. Hidup bermasyarakat diorganisir secara lain, yakni rasional instrumental, daripada cara menyeluruh sebagaimana terdapat di kampung, desa, dan keluarga. Birokrasi, teknologi, dan tata krama berubah sesuai dengan tata negara.

Hidup bermasyarakat pra-negara lain dari hidup bermasyarakat pasca-negara.<sup>16</sup> Indonesia pada tahap ini mengambang antara hidup bermasyarakat (kenegaraan) dan hidup berpedukuhan (musyawarah). Apalagi Papua. Komunitas basis, dalam keadaan mengambang demikian, merupakan pra-pilihan untuk turut berupaya dalam hidup bermasyarakat atau untuk melestarikan hidup berpedukuhan. Dikotomi demikian merupakan rumusan rekaan “zaman pencerahan” dan “filsafat modern”. Pilihlah Negara dan masyarakat! Tinggalkan ketertutupan dan keterbelakangan! Kesadaran akan *res publica* tidak mudah diperoleh melalui pola hidup desa saja. Perlu sekolah untuk menerobos wilayah-wilayah terpencil, terbelakang, terbelengkelai. Itulah pemicu untuk modernisasi negara. Standarnya adalah rasionalitas instrumental.

Tolok ukur *res publica* tetap menantang dari ufuk ke depan. Apa yang akan menjadi pola hidup bermasyarakat pada level negara? Para duka dan korban modernisasi sudah menjatuhkan pra-pilihan: merdeka. Sementara bagi beberapa pencicip kemajuan sedikit-dikitnya di kota-kota dan jenjang penjangkaran antar-wilayah, menjadi mandek, memilih bahwa sudah terpilih. Bagi mereka ini bukanlah saat untuk membahas permasalahan kemerdekaan, melainkan komunitas basis dan perannya terhadap hidup bermasyarakat. Namun, karena komunitas basis Gereja juga bersedian dengan hidup bermasyarakat dalam negeri, maka kelihatannya pola komunitas basis sangat mirip dengan partai politik, apalagi bilamana berurusan dengan politik tingkat negara. Tekanan dalam artikel ini adalah bahwa ada isu-isu lain hidup bermasyarakat dalam negara, selain kemerdekaan. Lagipula ada isu-isu bermasyarakat yang lebih lokal daripada tingkat negara. Umpamanya, kebutuhan paling dasar, nilai sosial, nilai kebutuhan bersama, namun bukan merupakan agenda politik kemerdekaan. Upaya untuk menjamin adanya air merupakan aksi kelompok masyarakat yang cukup fundamental supaya hidup rakyat boleh berjalan. Lagi, adanya air, bukan harus urusan negara, melainkan bisa jadi urusan rakyat. Jenis upaya demikian, yang meneliti kebutuhan fundamental agar terjamin lebih merupakan makna “politik” “ilmu polis” dari zaman pembentukan *polis* (*πολις*), res publika. Jadi, komunitas basis, dalam ideologi Gereja, lebih merupakan perwujudan demokrasi daripada perwujudan partai politik, per se.

---

<sup>16</sup> Sugiharto, 58-67.

**Penyadaran.** Proses penyadaran tentang kebutuhan hidup, dari satu segi, tidak terlalu perlu bilamana orang berkumpul untuk membahas keinginan kehidupan.<sup>17</sup> Namun, dari segi lain, dalam suasana di mana “*social construction of thought*” diatur oleh apa yang diperisyukan dan dipermasalahan, orang memang bisa lupa akan kebutuhan dan dasar hidup. Orang menjadi terlalu asyik akan agenda yang ditentukan oleh konformisme ideologi terkini. Dewasa ini perempuan dan kaum muda sering disodorkan sebagai dua kelompok yang lagi perlu dibicarakan. Isyu ibu hamil (gizi, kesehatan ibu-anak, hygiene, dan ancaman maut bagi anak-ibu, bantuan pada ibu yang baru saja melahirkan, dsb.) sering disebut sebagai agenda komunitas basis. Tentu saja agenda demikian juga merupakan agenda “modern”, tapi dalam rangka pengkiblatan kepada kaum tersisih maka nada pasca-modern pula menyolok.

Faham akan kebutuhan hidup justru mengedepankan *res privata* sebagai bidang yang mesti lebih terjamin oleh *res publica*. Hidup bersama di desa sama penting sebagaimana hidup di kota, karena berurusan dengan hidup, bukan pertama-tama dengan “isyu” agenda politik negara. *Res privata*, dalam hukum, bukan semata-mata “hal pribadi” yang terisolir dalam kesepian. Itulah memang rumusan individualisme. “Hal pribadi” menurut faham Carl Rogers adalah hal yang paling umum: paling menyebar dan didapati di antara semua orang, justru karena pribadi. Ajaran Gereja dalam *Gaudium et Spes* menekankan hal semisal, bahwa hidup masing-masing orang pribadi bernilai mutlak. Martabat manusia tidak bisa ditawar-tawar hingga menjadi salah satu faktor matematis dalam rumusan hidup bersama. Jadi hidup bersama dan perembukan komunitas basis berurusan pula dengan martabat manusia dan kebutuhan hidup semua dan setiap orang.<sup>18</sup> Hal-hal publik dan hal-hal azasi pribadi-pribadi dan kelompok merupakan agenda bagi kelompok basis.

### ***Martabat Manusia, Sosialisasi, Maksud Tujuan Upaya-Kerja***

Konsili Vatikan II, dalam Konstitusi *Gaudium et Spes*, menguraikan ajaran sosial Gereja tentang nilai-nilai yang dihargai dan dijunjung tinggi oleh Gereja katolik.<sup>19</sup> Tiga tema yang dipilih oleh para anggota konsili menyangkut topik-topik yang secara hakiki menentukan agenda ilmu kemanusiaan (sosiologi, antropologi, budaya, humaniora). *Bagaimana martabat manusia sebagai pribadi? Apa yang dapat dianjurkan demi membangun keluhuran masyarakat dewasa ini? Apa gerangan maksud jerih payah manusia di dalam dunia.* Tiga

<sup>17</sup> Lobkowitz, “Historical Materialism,” 416.

<sup>18</sup> Norton, “Ethical Priority of Self-Actualization,” 41 menggunakan istilah Plato tentang *arête*, “congeniality of excellences” (keserasian antara keutamaan-keutamaan) untuk menggambarkan bagaimana persekutuan sejati justru bersandar pada persekutuan dari penghargaan akan martabat masing-masing dan setiap orang.

<sup>19</sup> Schillebeeckx, “Theology of Earthly Values,” *The Church Today*, 71-80.

pertanyaan sosial ini diangkat dan dibahas oleh konsili dalam bagian pertama Konstitusi GS: manusia (GS 12-22), komunitas masyarakat (GS 23-32) dan upaya-kerja manusia di dunia (GS 33-39). Pokok-pokok ini tidak akan dibahas disini secara mendetail.

Kami berkiblat secara khusus kepada bab dua tentang manusia dalam komunitas. Pasal-pasal yang membentuk bab ini berkisar pada: hakekat komunal panggilan umat manusia, maksud Allah bagi umat manusia (GS 24), kesaling-tergantungan antara pribadi dan masyarakat (GS 25), masalah umum, yaitu *bonum commune* (GS 26), hormat bagi insan pribadi (GS 27), hormat dan kasih cinta bagi musuh (GS 28), kesetaraan hakiki antara semua manusia dan keadilan sosial (GS 29), kepentingan mengatasi kebiasaan filsafat individualisme (GS 30) dan tanggung jawab serta partisipasi dalam perwujudan hidup bermasyarakat (GS 31). Serangkaian butir-butir ini memberi agenda pokok program pembinaan dan pemberdayaan komunitas basis. Kami kutip saja dari GS 31:

Adapun supaya semua warganegara bergairah untuk melibatkan diri dalam kehidupan pelbagai kelompok, yang seluruhnya membentuk tubuh masyarakat, perlulah bahwa di dalam kelompok-kelompok itu mereka temukan nilai-nilai, yang menarik mereka dan membangkitkan kesediaan mereka untuk melayani sesama. Memang wajarlah pandangan kita, bahwa nasib bangsa manusia di kemudian hari terletak di tangan mereka, yang mampu mewariskan kepada generasi –generasi mendatang dasar-dasar untuk hidup dan berharap.

Menurut GS, partisipasi dalam kelompok basis sosial akan berjalan dengan rasa tanggung jawab pada anggota-anggota bilamana agendanya vital, berorientasi pada masa depan, berkiblat kepada kepentingan sesama manusia, dan bernada optimis. Kelompok sosial mana saja akan mengedepankan agenda yang memikat. Komunitas basis gerejani mesti meniru kriteria sosial umum jika mau berhasil dan bertahan.

Pada pasal terakhir dari setiap bab, terdapat suatu usaha untuk merangkum tema-tema sosio-antropologis dalam suatu tinjauan teologis-spiritual: Dalam bab tentang martabat manusia, pasal terakhir menyodorkan spiritualitas yang sesuai 'Kristus Manusia Baru' (GS 22). Bab kedua tentang komunitas umat manusia ditutup dengan pasal tentang 'Sabda yang menjelma dan kesetiakawanan insani' (GS 32). Bab ketiga tentang kegiatan dan upaya kerja manusia ditutup dengan pasal tentang 'Pemenuhan Upaya Manusia dalam Misteri Paska' (GS 38). Jadi, spritualitas eklesia yang diidamkan oleh GS justru tidak individualistis dan eklesiosentris, melainkan manusia sentris, komunal sosial, dan berakar dalam aktivitas manusia dalam dunia kerja dan dunia hidup. Pemberdayaan kelompok basis selalu akan sanggup mengintegrasikan dimensi transendental spiritual dari rencana Allah dalam usaha manusia untuk menggapai integritas pribadi, solidaritas sosial,

penghargaan fundamental pada upaya dan kerja manusia. Tiga soko guru ini mesti menandai komunitas basis gerejani sama seperti juga menandai kelompok-kelompok sosial mana saja yang lain dalam hidup bermasyarakat.

### ***Negara dan Komunitas HAM***

Negara dan masyarakat bersendian secara erat dan dekat. Namun tidak sama. Komunitas masyarakat merupakan kepentingan hak azasi manusia bukanlah, per se urusan politik, melainkan penjaga negara dan aparat negara supaya peduli akan tugasnya melayani masyarakat. Jelaslah tema HAM main peranan penting dalam pemberdayaan Komunitas Basis.

### ***Peran Agama dalam Masyarakat: Ufuk Moral***

Bukanlah seluruh urusan beriman orang kristen berkisar pada dan berkiblat kepada hak azasi. Salah satu peran penting dari agama, dalam hal ini adalah menilai. Ufuk moral bukanlah tugas negara, per se. Tentu saja diharapkan semua tampuk pemerintahan menjalankan tugasnya secara moral dan etis. Namun “pengawasan” dari masyarakat akan nilai-nilai moral sering dilihat sebagai sumbangan khusus dari pranata sosial agama terhadap pranata sosial negara. Agama mesti menyadari perannya sebagai pelestari dan pelindung masalah umum, justru dari perspektif kesadaran sosial dan hati nurani sosial. Gereja, terlebih melalui kaum awam yang berkomitmen tinggi, bisa menjadi sukma moral bagi suatu negara.

Dalam hal demikian, moralitas tentu tidak seidentik dengan agama. Moral publik perlu diupayakan bersama-sama dengan manusia lain yang baik budi.<sup>20</sup> Menggapai etika sosial untuk hidup bernegara jangan dilihat sebagai urusan satu agama semata-mata.

Sering jadi bahwa kaum politikus, komentator sosial, dan sarjana-sarjana hukum juga berperan, bukan hanya sebagai pegawai negeri, melainkan juga sebagai animator moral negara. Komunitas basis yang berfokus kepada kepedulian etika sangat dibutuhkan dalam hidup bernegara mana pun juga.

### **Komunitas Basis: Segi Sosio-Antropologis**

#### ***Sosiologi dalam Perspektif Dinamika Budaya***

Karl Marx menambahkan kepada ilmu sosiologi suatu perspektif yang amat penting bagi dunia modern (dan dunia pasca modern). Kenyataan sosial bukan cuma “fakta” melainkan terbuka kepada pengaruh manusia. Masyarakat bukan benda, melainkan kenyataan yang dapat malah harus direkayasa. Hidup

---

<sup>20</sup> Bellah, “Institutional Dilemmas as Moral Dilemmas,” 38-42.

bermasyarakat bukan teruntuk dipelajari dan ditelaah semata-mata, melainkan untuk diubah dan diperbaiki.<sup>21</sup>

Hidup bermasyarakat adalah tataan rasional yang perlu direalisasi. Sejarah kenyataan-kenyataan sosial tidak hanya menoleh ke belakang dan meninjau apa yang pernah ada, melainkan bertanya-tanya apa gerangan dapat diperbuat agar hidup manusia lebih berbahagia dan lebih jitu. Hidup paling sejati bukanlah “awal mulanya” zaman emas, tempo doeloe. Hidup sejati mencakup ufuk masa depan, besok yang adil, lusa yang damai, itulah yang baik.

Komunitas basis, dalam perspektif dunia sosial sosiologi neo-marxis mengandaikan dunia ekonomi modern, industrial, dan tata sosial pemukiman di kota, diferensiasi antara pemilik, buruh, dan penjual. Di sini kami menguraikan secara sederhana. Namun, kiranya cicipan awal ini cukup untuk melihat manfaatnya bagi pemberdayaan komunitas basis – serta tantangannya – di Papua.

**Situasi Papua.** Kita bisa bertanya sejauh mana pola sosiologis “dinamika sosial” dapat dicocokkan untuk pemberdayaan komunitas basis di pulau Papua. Jelaslah bahwa Indonesia sedang memilih – atau sedang merestui pilihan global – untuk menjadi negara tinggal landas neo-liberal, kapitalistis. Papua tidak terlalu diminta pendapat akan hal itu. Namun, sumber alam yang kebetulan kaya-raya sudah terlanjur “memilih” baginya, bahwa pulau ini memang bermanfaat untuk pola pembangunan nasional. Pulau Papua terlibat, tahu tidak tahu, mau tidak mau di dalam dunia ekonomi mondial.

Secara dialektis semua ketidak-tahuan itu belum tentu negatif. Juga tidak semua positif. Dampak untuk anak-anak rajin positif: bisa bekerja, bisa sekolah, bisa pindah, bisa naik golongan, bisa berpengaruh, bisa apa saja. Dampak untuk budaya tradisional cukup membingungkan dan mengancam. Manfaat tidak terlalu menonjol bagi mereka yang tidak “bekerja”, yakni bekerja di dalam sistem pekerjaan industrial dan modern itu. Juga tidak terlalu menguntungkan bagi pekerja kasar, buruh upahan. Memang ada manfaat sedikit. Namun, bukan manfaat “seorang pemodal” dan “pemilik” faham tradisional tentang posisi diri di dalam alam raya dan alam sosial. Jadi dirasakan keterpurukan melebihi dosa asali.

Dengan demikian, sistem ekonomi, menjadi penting sebagai pokok pembahasan komunitas basis. Sayangnya, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, menjadi penghalang untuk turut serta dalam diskusi sistim ekonomi dari segi “ilmiah”. Dan, memang komunitas-komunitas basis tidak

---

<sup>21</sup> Marx, dikutip dari Theses on Feuerbach, No XI: “*The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it.*” 423.

pernah dimaksud sebagai klub studi. Akan tetapi bisa dipertanyakan mutu diskusi dan perembukan dalam komunitas basis tak terpandu apalagi kesenjangan komunikasi ke pihak luar dalam pertemuan antara dua sistem ekonomi demikian. Makelar dan jembatan sosial – atau dalam bahasa sosiologi dinamis – agen-agen perubahan kiranya dibutuhkan bilamana interesse dan harapan dari kelompok yang rasa “one down” bisa rasa percaya diri dan berdaya.

Namun, karena kebanyakan pastor-pastor pun merasa tidak berdaya di dalam bidang sosio-ekonomis, maka kita mendapat situasi “two down”. Pimpinan Gereja tidak terlalu berbeda kampungannya dari orang sederhana lain.

### ***Kota dan Desa: Susunan Sosial, Struktur Keekerabatan***

Masalah fundamental yang selalu timbul bilamana dibahas Komunitas basis di Papua ialah masalah kota dan desa, struktur sosial *Gesellschaft* (sosietas) dan struktur *Gemeinschaft* (komunitas).<sup>22</sup> Lagipula peran struktur keekerabatan dari masyarakat Papua sangat dominan dan nyaris eksklusif, monopoli bagi peran sosial tradisional. Pendekatan modernisme ialah “mengutuki” keterbelakangan komunalisme, tribalisme, dan partikularisme eksklusif. Pendekatan pasca-modern lebih lunak, malah positif terhadap struktur komunal keekerabatan, namun positif pun secara dialektis.

Kekuatan pola desa, pola kerabat, dan pola komunal cukup jelas dari apa yang dikedepankan tadi. Relasi tatap muka, perjumpaan dengan menggunakan ukuran keseringan, interaksi antara generasi, kerja sama dalam dunia kerja, dan kesetaraan antara orang (dewasa/pria) menonjol dalam banyak tataan sosial egaliter – seperti di Papua. Kesulitan muncul bila pola sosietas (termasuk negara dan birokrasi institusional) dimasukkan ke dalam komunitas dan diasimilasi dalam pola komunitas tanpa menghiraukan ciri-ciri sosietas: “skala kebesaran”, peran di atas pribadi, impersonalisme, tujuan-tujuan terbatas dan bukan menyeluruh, kepiawaian organisasional, efisien kerja, pelayanan merata tanpa pandang bulu, dan prosedur baku. Tentu adanya perbedaan antara nilai, budaya, dan praktek dari kedua sistem dan acuan sosial (yakni sosietas dan komunitas) ini. Bila tidak perlu dilihat pada poros oposisi mutlak, namun selalu akan ada konflik penghargaan dan ketegangan operasional.

Komunitas basis yang berkiblat kepada pola rasa persekutuan *ad intra* akan lebih tangguh bertahan “*ad intra*” terhadap perubahan namun juga lebih tertutup dari komunitas basis yang berkiblat kepada aksi sosial (sosietas): *ad extra*. KBG bisa merupakan salah satu struktur mediasi/pengantara penengah antara komunitas dan sosietas.

---

<sup>22</sup> Lht. Tönnies, 11-27.

Keluarga yang dicari bilamana orang desa pergi pindah ke kota sudah jelas terbukti. Masih bisa diupayakan dan diutarakan pengaruh dan daya aksional dari kelompok demikian atas hidup bermasyarakat secara lebih teratur dan lebih berdaya guna. Komunitas basis masih perlu diperdayakan demi melihat peran sertanya secara vokal, efektif, dan bukan serba berinterese kepada partikularismenya.

Di tingkat desa, pola partisipasi<sup>23</sup> dan tanggung jawab bisa berjalan lebih mulus dan efektif. Tentu saja ada dimensi altruistik juga: di mana orang tertentu rela berkorban demi kepentingan sesama. Namun, dalam tolok ukur komunal, kurban jangan sampai dijadikan menguntungkan satu-satu orang, berkat jerih lelah seseorang sendiri. Masalah dengan "isu" atau "agenda" komunitas basis di desa ialah bahwa cakrawala pandang 'kampungan' kurang memasukan tantangan dari sosietas global: terlebih untuk pemuda-pemudi dan masa depan kelaknya. Angkatan berikut akan berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat lain daripada angkatan sebelumnya: juga kalau menetap di kampung asalnya. Sosialisasi sekunder yang dijalankan di desa, berkat komunitas basis, mesti juga memiliki unsur 'sosietas'. Di sini lah terletak salah satu peran para "pemberdaya" (pastor, ketua, katekis, orang-orang yang terdidik): bukan untuk memimpin (secara struktural), melainkan menuntun secara profesional, mengintroduksikan ide, memberitakan tantangan yang (akan) dihadapi oleh anak, mengedepankan masa depan ufuk jauh. Tentu saja "meramalkan" masa depan tidak tepat bila diulas sebagai "pelihat" yang berperan sebagai nabi-sihir. Namun, tokh adanya dunia luas dan global yang lebih menantang dari kenyataan hidup sehari-hari di kampung. Kiranya ufuk sehari-hari dari hidup sehari-hari juga terbatas manfaat dan nilainya. Seorang pemberdaya dapat melihat betapa nisbi-dialektis hidup sehari-hari, termasuk hidup rasa kekeluargaan, rasa *belonging*, rasa kepastian, dan buta terhadap dosa sesama dan kejahatan saya sendiri.

Ide-ide yang disodorkan dalam bagian ini, lebih mengedepankan pokok-pokok sosiologis daripada pokok-pokok keagamaan, teologis, atau kegerejaan. Dinamika perubahan sosial tentu merupakan suatu faktor besar. Pendidikan dan sosialisasi sama-sama besar dan menantang. Namun di dalam "dunia lengser" di mana segala-galanya sedang dialami sebagai dunia sungsang, komunitas basis juga bisa menjadi forum ngobrol dan berkeluh, pembagi gosip terkini, dan berita burung dari sumber yang bisa jadi tak dapat dipercaya. Fungsi "forum omong" jangan disepelekan.

---

<sup>23</sup> Clifford, "Participation and Myth," 200-215.

## Pemberdayaan

### *Usaha Pastor dan Uskup*

SAGKI 2000 menghimbau Pembentukan dan Pemberdayaan komunitas basis. Pemberdayaan menyangkut usaha untuk memberi hidup dan daya, optimisme dan kesanggupan kepada kelompok-kelompok yang menghayati hidup bersama dalam, melalui dan berkat komunitas basis.

Di Papua semua keuskupan dan masing-masing sendiri-sendiri mesti mendekati soal pemberdayaan secara aktual dan serealistis mungkin. Namun, secara lebih umum dapat disodorkan bagi kita satu-dua kriteria yang disuguhkan oleh SAGKI 2000 untuk mengukur apakah kelompok komunitas basis tertentu memang berdaya.

#### Kriteria komunitas basis yang berdaya

1. Siapa berpartisipasi?
2. Jumlah anggota efektif?
3. Pertemuan berjalan berkala? Berapa sering?
4. Terasa suasana kebersamaan dan kerja sama?
5. Ada keputusan yang diambil oleh kelompok?
6. Adakah kegiatan (*ad extra*)? Mana?

SAGKI 2000 memberikan definisi kerja Komunitas Basis begini: “Komunitas basis itu dipandang sebagai suatu satuan umat yang relatif kecil dan yang mudah berkumpul secara berkala, untuk mendengarkan firman Allah, berbagi masalah sehari-hari, baik masalah pribadi, kelompok, maupun masalah sosial, dan mencari pemecahannya dalam terang Kitab Suci (bdk. Kis. 2: 1-47)”. Kemudian ditambahkan dalam laporan, sebagai keterangan “Komunitas basis seperti ini terbuka untuk membangun suatu komunitas yang juga merangkul saudara-saudara beriman lain”. (SAGKI, 10, hlm. 14).

Melihat unsur-unsur dari definisi di atas, dan membandingkannya dengan kriteria umum yang saya sodorkan, maka terdapat keselarasan.

Enam pertanyaan saya di atas menyangkut kelompok yang berdaya juga disentuh oleh definisi kerja SAGKI, namun tanpa point ke lima. Lagipula pertanyaan pertama lebih pada kepentingan partisipasi para partisipan daripada hanya jumlah. Soal “siapa” juga bisa menanyakan tentang usia, gender, peran, dan konfigurasi keseluruhan interese pada kelompok yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pertanyaan kedua: dapat ditanyakan kapan kelompok menjadi terlalu kecil atau terlalu besar sehingga tidak efektif? Bila

rasa kebersamaan (*ad intra*) ditekankan, jumlah di atas 15 orang sudah mulai terasa terlalu besar sehingga menciptakan rasa anonim. Dinamika impersonal mulai terasa. Bila efektivitas ditekankan (*ad extra*), bisa jadi aksi massal yang dikerjakan oleh satu kelompok yang jumlahnya besar memang lebih menyakinkan pihak lain. Namun apakah “kelompok “ massa ada daya tahan untuk berkumpul bersama?

Bukankah sistem “penjaringan” antara kelompok-kelompok Komunitas masih akan lebih tepat bagi usaha pemberdayaan sosial, sehingga semua kelompok basispun sungguh rasa berdaya, justru karena partisipasi aktual dan aktif dalam kelompok basis dihitung dan dihargai?

Pertanyaan ketiga menyangkut tolok ukur waktu. Jika KB(G) hanya berkumpul untuk menanggapi krisis, maka rasa komunio tidak berkembang. Struktur sosial budaya petani mengandaikan betapa enak “rasa berkumpul”. Sedangkan prinsip dasar untuk berkumpul bagi masyarakat Papua yang peramu acap kali ialah semangat atau krisis.<sup>24</sup>

Pertemuan rutin membosankan tidak “memadai”. Patokan dari KWI untuk keseringan/pertemuan berkala adalah tolok ukur normal dalam analisis kelompok dewasa ini. Absensi dan keterlambatan digunakan (dalam tafsiran ilmuwan Barat) sebagai tolok ukur gejala “cek out” dari kelompok atau kejenuhan akan kegiatan yang dijadwalkan. Orang yang dengan mudah “minta diri” atau malah tidak “minta permissi” menandakan, dalam ilmu dinamika kelompok (terutama bagi si fasilitator), bahwa rasa tanggung jawab dan partisipasi dalam kelompok tidak kokoh kuat.

Apakah pengandaian demikian cocok untuk analisis kelompok KB(G) di Papua? Untungnya dari tolok ukur frekuensi itu ialah bahwa tidak dinilai – pertama-tama – motivasi dari orang yang bersangkutan, melainkan cuma perilakunya. Di dalam dunia modern, di mana waktu ditata dan ditertibkan oleh ekonomi jadwal kerja, maka “*on time*” dan “menepati waktu” adalah tolok ukur bernilai tinggi. Sedangkan, dalam dunia tertata oleh puluhan faktor lain (anggota keluarga yang sakit, tak ada arloji, jam karet, hujan, dlsb, memang tidak diharapkan mulai pada jam tertentu), maka keunggulan dari tolok ukur “keseringan” pertemuan juga harus diartikan secara nisbi. Namun, dapat dikatakan juga, sebagai kesimpulan sementara, bahwa faktor frekuensi pertemuan toh tetap merupakan suatu standar bahwa KB(G) ada dan bertahan

---

<sup>24</sup> Clifford, “Gens de la Grande Terre, “ 170-171. Clifford mengutip Leenhardt yang menyapa para rekan misionaris begini: “Kita, para penjajah [kata Leenhardt], tidak melihat ..... kita tidak menggubris kebudayaan yang halus , tangguh, dan sudah berdaya di sini sebelum kita. Budaya ini masih hidup, walaupun kita agaknya nyaris membasminya, karena kita tidak memiliki matahati untuk menyelami keseniannya atau citarasa peduli akan sastranya.”

atau tidak. Gejala absensi dan jarak jauh antara pertemuan yang satu dengan yang berikutnya, main peranan dalam menentukan apakah kelompok fungsional atau tidak. Keterikatan dan partisipasi ditandai oleh keinginan untuk bertemu.<sup>25</sup> “Tidak jadi” bukan hanya fakta, melainkan juga tolok ukur penilaian akan “interese” orang yang bersangkutan terhadap kegiatan yang terjadi. Apatisme dan rasa acuh-tak-acuh bukan saham besar untuk mengembangkan suatu sistem atau gerakan Komunitas Basis.

**Ownership.** Sebagai catatan sosio-antropologis terakhir dari saya, saya mau mengangkat pertanyaan akan “ownership” program ini. Tentu saja SAGKI 2000 melibatkan semua keuskupan dan uskup setanah air. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tema ini dropping dari atas melulu. Sosialisasi tema ini pada level provinsi (Papua) dan keuskupan masing-masing bisa, dari satu segi, diartikan sebagai *follow-up*-nya dari musyawarah nasional. Akan tetapi, jelas berapa jumlah orang yang mempelopori ide dan pertemuan. Sejauh mana pengembangan sistem KB(G) akan tinggal landas di Papua? Apakah para pastor berkeyakinan mengedepankannya sebagai sarana pastoral yang (paling) ampuh, juga di masyarakat Papua? Bila kita ingat akan sejarah KB(G) di Papua sampai sekarang, sambil merujuk juga kepada tataan sosial masyarakat Papua, yang terdiri dari “*loosely structured society*” (menurut analisis J. Pouwer),<sup>26</sup> apakah sistem KB(G) yang dipinjam dari Amerika Selatan – dan sistem sosial Amerika Selatan – tidak mengandaikan terlalu banyak prasarana sosial sebagai “bahan baku” sebelum dimulai dan dapat diharapkan sukses? Secara sepintas dan intuitif saya mau katakan bahwa pranata sosial Komunitas Basis (Gereja) tetap rada asing terhadap kelompok-kelompok yang lebih dapat memecahkan masalah dengan mundur daripada maju, menghadap dan berunding. Bila orang “memilih dengan kaki” maka sangat penting bagi fasilitator/pastor/penggerak untuk memantau perilaku dan tingkah langkah dalam usaha pemberdayaan KB(G) ini. Absensi merupakan data yang penting ditafsirkan. Usaha “untuk menghindari” memang lain daripada “kebetulan tidak hadir”. Tentu saja “penggerak” (entah uskup, dengan komisi-komisi keuskupan, pastor, katekis, ketua dewan paroki, sejumlah pemerhati perempuan, profesional, pemuda, dan lain sebagainya) akan memiliki ketangguhan lebih daripada cuma semangat asali pada awal mula gerakan. Jadi, bila program dinilai tidak berhasil setelah lima tahun, mungkin melalui evaluasi itu bisa diputuskan pendekatan lain daripada sistem KB(G).

<sup>25</sup> Leenhardt, “Computation of time,” 74-91.

<sup>26</sup> Pouwer, “Loosely Structured Societies in New Guinea”, pernah bekerja di Papua, terutama di wilayah Mimika. Analisis tentang struktur sosial bersandar pada kemudahan yang terdapat untuk bongkar an pasang kembali struktur yang ada. Tidak dibutuhkan kestabilan, melainkan justru daya improvisasi dan kesanggupan untuk merekayasa siasat selalu serba baru. “Seorang peramu disebut seorang improvisator”, Boelaars, 15.

Pertanyaan keempat menyentuh kebutuhan teras. Anggota sendiri merasa tersentuh karena partisipasi dan merasa bertanggung jawab. Fakta mutlak ialah bahwa “pemberdayaan” tergantung pada rasa tanggung jawab. Bila tanggung jawab diambil alih oleh “penggerak”, maka juga cuma dialah yang menderita nestapa frustrasi (*dukkha*).<sup>27</sup> Inti masalah tanggung jawab, muncul berdasarkan analisis tentang azasnya dan ownership frustrasi. Kalau frustrasi para anggota berbeda dengan frustrasi penggerak, ada masalah. Analisis frustrasi bisa diartikan sebagai perhatian terlalu “negatif” terhadap hidup komunitas basis. Akan tetapi bisa dilihat juga sebagai gejala yang duluan timbul ke atas, pada level perasaan, sebelum orang mengambil keputusan. Jika frustrasi tidak bisa diselami dan tidak ditanggapi akan beralih kepada keputusan “minta diri”.

Frustrasi berhubungan erat dengan perasaan “kecewa” kalau sesuatu tidak jadi dan “cita-cita yang diinginkan gagal, angan-angan yang disyerinkan antara lebih dari satu orang tak tercapai. *Shared expectation* terasa difrustrasikan karena ada pengharapan yang sudah lebih dahulu diyakini dan dianut bersama. Kalau pengharapan hanya di benak hati pemimpin, dapat diramalkan, jika gagal, hanya dialah yang frustrasi. Frustrasi adalah kata negatif dari gejala positif perihal kebutuhan teras.

Maka sangat penting pada mulanya dan sering-sering untuk mengadakan pengecekan, sejauh mana ada pengharapan, sejauh mana pengharapan lain daripada yang sebelumnya, sejauh mana prioritasnya tetap (yakni, teras) penting, dan sejauh mana kebutuhan itu mengikat kita satu sama lain (*shared*). Keuletan dari suatu kelompok – bila tidak tergantung pada hubungan darah – akan tergantung pada pertautan interese dan kebutuhan teras bersama. Dalam bahasa hasil SAGKI istilah yang dipakai untuk ini adalah “masalah”. Kalau “frustrasi” atau “masalah” atau “pengharapan” ditafsirkan bukan sebagai penghalang melainkan sebagai motivator, pemicu, titik gatal untuk bergerak, maka daya dalam suatu kelompok justru kepada kadarnya “getaran” hati sehubungan dengan perasaan itu.

Tolok ukur kelima menyangkut keputusan. Ide dasar ini bukan siapa kiranya yang mengambil keputusan. Keputusan bisa diambil oleh satu orang. Bisa diambil oleh semua. Soal siapa yang mengambil keputusan adalah soal di mana terletak rasa berdaya dan berwewenang. Namun, tolok ukur yang saya utarakan di sini sedikit lain, sedikit lebih formal: apakah sama sekali pernah diambil keputusan tentang sesuatu hal?

---

<sup>27</sup> Bond, “trapped ... human beings experience profound dukkha.” hlm. 141. Kata Sansekerta ‘*dukkha*’ tepat diterjemahkan dengan kata frustrasi, mandeg, kandas, rasa tak berdaya, yaitu persis lawan kata dari “berdaya”.

**Keputusan.** Suatu kelompok Komunitas Basis yang hanya berkumpul – seperti pada ibadah hari Minggu – dan tidak mengambil keputusan, entah dengan bermusyawarah, entah dengan voting, entah dengan penelaahan dan diskusi *problem solving*, akan menjurus kepada kelompok tidak berdaya.<sup>28</sup> Kelompok basis yang tidak mementingkan keputusan tidak peduli akan perubahan. Yang penting, : kumpul saja. Kita tidak memiliki alasan untuk berbuat, selain berkumpul. Jadi selain pengharapan bersama (*shared expectations*), ada kepentingan akan tekad bersama dalam Komunitas Basis. Kehendak kita penting. Tentu kehendak kita juga bebas, bukan kehendak kelompok. Maka berbuat sesuatu bersama membutuhkan proses untuk mencapai pembulatan kehendak bersama, yang namun demikian tetap bebas dan mengikat kita satu sama lain, masing-masing.

Keputusan yang matang seringkali harus berhadapan dengan pemali untuk menghendaki partisipasi dalam pengambilan keputusan. Perempuan dan anak tidak tepat mengharapkan partisipasi demikian – tentu saja azas demokrasi lain (sekurang-kurangnya bagi perempuan). Gereja pun bisa lain, juga bagi mereka yang sedang belajar mengambil keputusan – termasuk remaja dan kaum taruna yang lebih muda lagi. Komunitas Basis (Gerejawi) bisa menyumbang kepada proses peningkatan azas demokrasi publik<sup>29</sup> dalam negara mana saja, justru karena kelompok-kelompok masyarakat lebih terlatih dalam proses pengambilan keputusan bersama. Kelompok yang mengambil keputusan terbedakan dari kelompok yang cuma memandangi realitas dan mengalami realitas, sebagaimana diulas oleh Marx<sup>30</sup>. Proses pengambilan keputusan memberdayakan orang sebagai subyek berdaulat atas riwayat hidupnya, apalagi kelompok berdaulat dalam riwayat hidup bersama. Bila keputusan diambil oleh dewan paroki, umpamanya, dan hanya disosialisasikan, yakni: dilaksanakan oleh kring, Komunitas Basis, maka memang lain sekali rasa berdaya dan rasa berkepentingan untuk melaksanakan program tersebut.

Tolok ukur keenam berkaitan dengan yang kelima. Apakah ada kegiatan, sesudah keputusan? Apakah terjadi sesuatu yang diinginkan? Bisa jadi juga bahwa ada kegiatan yang dilaksanakan oleh sementara anggota KB(G) namun bukan semua. Inisiator dan pelopor bisa menjadi orang yang memutuskan akan berbuat sesuatu (umpamanya, pungut sampah – botol, kaleng, plastik, dan lain sebagainya – di pinggir jalan raya, setiap bulan sekali) dan berdasarkan tekad itu, orang lain dari kelompok mau *nebeng*, turut serta. Namun, dia – si pelopor – bertekad berbuat demikian – juga bila tidak ada teman, tidak adanya pendukung – bukanlah keputusan bersama. Jenis

<sup>28</sup> Lobkowics, "The Era of Politics," 207.

<sup>29</sup> Bellah, "The Public Church," 177-219.

<sup>30</sup> Lobkowicz, "Praxis: Critique or Action?" 215.

kegiatan ini belum tentu kegiatan kelompok karena keputusan, melainkan karena keyakinan seseorang. Dan bisa jadi ada macam-macam kegiatan personal demikian berkait inspirasi KB(G) tertentu.

**Kegiatan/aksi kebersamaan.** Bukan semua kegiatan bersama harus menjadi aksi politik, aksi sosial, aksi demo dan aksi perubahan ketidakadilan.<sup>31</sup> Ada kegiatan bersama 'sosio-privat' seperti saling menjaga anak dari tetangga, bantu cuci pakaian bagi ibu yang bercerai, bergotong-royong dalam membersihkan kintal di RW tertentu. Jenis-jenis kegiatan sosial ini memang cenderung kepada fisik, nyata, namun sangat penting untuk mengakrabkan anggota suatu paguyuban. Namun, aksi sosial dan aksi perubahan masyarakat menyangkut peranan lebih lama. Pada ufuk yang lebih jauh, yang menyangkut langkah-langkah terencana sebelum tergapai, akan menuntut aksi keputusan dan keuletan dalam menghadapi frustrasi normal lebih daripada rasa puas hanya dengan melihat kintal bersih. Jenis keuletan ini tidak muncul secara spontan.

**Aksi permulaan.** Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan untuk kelompok basis, pada langkah awal, maka amat penting agar direncanakan hal-hal yang "berhasil" yang "sukses" cukup cepat sesudah dimulai. Kalau tekad pertama menyangkut perubahan sistem pendidikan di Papua, kita insyaf bahwa "si naga raksasa" itu akan mengalahkan lebih banyak pengrajin daripada menghasilkan perasaan pemuasan dini. Dalam ilmu "perorganisasian komunitas" Saul Alinsky<sup>32</sup> menuturkan betapa penting agar kelompok aktivis, yang nota bene condong putus asa bila berhadapan dengan frustrasi, harus ada beberapa kegiatan yang menghasilkan sesuatu nyata dan positif pada fase permulaan. Kalau tidak, maka frustrasi yang ditambah frustrasi akan meninabobokan kejengkelan dan mengendapkan suatu keyakinan bahwa kita tokoh tidak bisa berbuat apa-apa.

Kegiatan "sukses", cukup penting dalam usaha awal untuk memberdayakan kelompok apa saja. Maka, selain keputusan, perlu adanya kegiatan sukses dan aktivitas yang betul jadi selanjutnya.

**Aksi perubahan sosial.** Rencana untuk mengubah sesuatu dalam masyarakat – sebagaimana diidamkan oleh gerakan Komunitas Basis – menyangkut kegiatan persuasi dan, terlebih seni persuasi bagi orang lain/lawan pendapat. Kepiawaian untuk menyakinkan orang lain akan suatu *point of view*, yang dianut di kelompok basis, merupakan tujuan nan jauh bagi kelompok Komunitas Basis tipe ragi masyarakat. Bagi kelompok Komunitas Papua, perlu

---

<sup>31</sup> Bernstein, "Man as Craftsman," 213-219.

<sup>32</sup> Alinsky, *passim*.

disentuh masalah bahwa budaya nasional Asia, termasuk Indonesia, tidak suka pendekatan langsung, blak-blakan, konfrontatif, dan konfliktual.

Masalah konflik sangat berbeda dalam budaya Papua. Kehalusan tidak sama dengan Indonesia Barat. Namun, lama-kelamaan pihak sosietas yang bekerja di Papua juga mulai belajar mengenai kepentingan interaksional dengan masyarakat Papua juga dalam hal menghadapi konflik. Mungkin salah satu sumbangan kepada pengembangan budaya di Indonesia bisa dihasilkan dari proses-proses konfliktual yang diolah dan diikhtiarkan oleh kelompok-kelompok basis yang berani mengutarakan keberatan dan menimbulkan konflik: atau lebih tepat menyembulkan ke permukaan sosial konflik yang dirasakan sebagai harta yang terpendam di benak hati saja. Tentu saja konflik demikian ini mesti “ditata” melalui nilai perikemanusiaan dan nilai kesopanan dan penghargaan kepada sesama manusia, namun, kita juga tahu bahwa ada lebih dari satu cara untuk mengutarakan dan mengolah konflik daripada membungkamnya. Kemahiran dalam mengedepankan konflik *inevitable* (tak terelakkan) merupakan fakta sosial dari dunia modern dan dunia pasca-modern yang majemuk. Jadi, resolusi konflik merupakan salah satu dari kegiatan komunitas basis yang bernilai luhur, karena martabat manusia digapai dan diperjuangkan melalui usaha menghadapi hal-hal yang tidak beres di dalam manusia dan masyarakat lama.<sup>33</sup>

Kiranya nilai positif dari konflik – unsur hakiki pada jantung demokrasi – masih merupakan nilai agak eskatologis dalam benak hati banyak orang daripada nilai peperangan, perkelahian dan pencideraan dan pelecehan (jasmani, rohani, atau mental) dari lawan bicara.<sup>34</sup> Upaya untuk memberdayakan komunitas basis akan harus juga mengolah soal konflik nilai, konflik pendapat, dan konflik interese. Pendewasaan komunitas basis akan mencadangkan agenda konflik pada program pemberdayaan – kalau-kalau bukan pada bulan-bulan madu awal, toh sebelum tahun kedua berlalu.

### **Struktur Paroki: *Paroikia***

Tantangan khusus untuk memberdayakan komunitas basis ialah pra-faham tentang struktur gerejani yang sudah diberdayakan selama sekian abad. Kita tidak bermaksud membahas di sini seluk-beluk sejarah jadinya Gereja lokal (yakni, katedral uskup) dan sejarah Gereja tingkat yang kini kita sebut paroki.<sup>35</sup> Yang pertama (katedral) berkembang selama abad-abad pertama Gereja bahari terutama di wilayah kedaulatan Kekaisaran Romawi dan yang kedua lebih diikhtiarkan semenjak St. Bonifasius, ketika Injil merambat di Eropa Utara,

<sup>33</sup> Lippmann, “Kebebasan Berbicara,” 130.

<sup>34</sup> Lippmann, “Mempertahankan Keberadaban,” 169.

<sup>35</sup> Bellah, “Local Church, Big Church,” 195-202.

di luar kawasan Kekaisaran Romawi, malahan di luar dunia peradaban dan perkotaan Roma. Kedua sistem pengorganisasian Gereja bertitik tolak dari seperangkat masalah dan tantangan yang berbeda. Kita juga tahu bahwa sistem<sup>36</sup> parokial teritorial diselidiki dan ditinjau kembali, dari segi sejauh mana tetap adekuat untuk menata Gereja “dewasa ini” di dunia industrial dan ultra-modern. Pola pastoral kategorial merupakan salah satu bentuk yang disarankan sebagai pengganti pola teritorial-parokial.

Dalam artikel ini kami mau menyodorkan suatu wawasan akan paroki (*paroikia*) yang terdapat dalam Kitab Suci. Istilah *paroikia* (dan *paroikeô/paroikos*) muncul hanya beberapa kali di dalam Kitab Suci.<sup>37</sup>

Saudara-saudaraku, yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang (*paroikous*) dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. (I Ptr 2: 11-12)

Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang (*ton tes paroikias hemon chronon*) di dunia ini. (I Ptr 1: 17b)

Karena iman ia (Abraham) diam (*parôkêsen*) di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing (*ôs allotrian*) dan di situ ia tinggal (*katoikêsas*) di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. (Ibr 11: 9-10)

Demikian kamu bukan lagi orang asing (*zenoi*) dan pendatang (*paroikoi*), melainkan kawan sewarga (*sumpolitai*) dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah (*oikeioi tou theou*) yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. (Ef 2: 19-20)

Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka di Mesir sebagai orang asing (*en tê paroikia en gê aigyptou*). Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu (Kis. 13: 17)

Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya (y.i., keturunan Abraham) akan menjadi pendatang di negeri asing (*paroikon en gê allotaria*) dan bahwa mereka akan diperbudak (*doulôsousin*) dan dianiaya (*kakôsousin*) empat ratus tahun lamanya. (Kis. 7: 6. Firman Allah = Kej. 15:13: *gêr yihyeh zar<sup>e</sup>ts<sup>e</sup>ka b<sup>e</sup>eretz lô lahem*)

<sup>36</sup> Cantor, tentang misionaris Rahib Boniface OSB (y.i. Wynfrid) dan pembentukan paroki, 167-171.

<sup>37</sup> Alliot, “The meaning and use of Paroikos related terms in Peter,” 37.

Seorang dari mereka, namanya Kleopas menjawabnya: “Adakah engkau satu-satunya orang asing (*paroikeis*) di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?” (Lk. 24: 18)

*Paroikia* adalah “rumah kediaman pemukiman di luar kampung halamannya sendiri”. *Paroikia* merujuk bukan kepada ‘paroki’ orang setempat, melainkan semacam quasi-rumah di luar tempat aslinya, yang diatur sedemikian sehingga orang pendatang rasa betah [yaitu *bait-iah*], walau bukan di baitnya sendiri. *Paroikia* adalah “*home for the homeless*”.<sup>38</sup> Perhimpunan dan paguyuban bagi mereka yang pendatang, di luar tempat asalnya. Tugas fungsionalnya *paroikia* adalah agar diciptakan suasana *betah* bagi warganya, yang adalah pendatang. Entah pendatang sosial, entah pendatang religius<sup>39</sup> karena diasingkan dari kediamannya di kota yang akan datang (Ibr 11: 9 & Kis. 7: 6, 13: 17, Ef. 2: 20). Kewargaan orang “parokial” adalah per definisi warga di tempat lain dan anggota kawasan/rumah lain, baru akan betah kelak di “bait Bapa Allah”.

Di dalam “kring” dan “lingkungan” paroki-paroki besar di kota-kota di Indonesia, termasuk di Papua, justru paguyuban berfungsi sebagai *paroikia*, *home away from home*, suasana ramah bagi musafir dan pendatang sementara yang “numpang lewat”; *sense of belonging* (rasa betah) ada di rumah lain, seperti kampung halamannya sendiri. Jadi, fungsi parokial amat penting sebagai stasi transisional: entah dari desa ke kota, entah dari pekerjaan “sana” ke pekerjaan “sini”, entah dari rumah orang tua kepada rumah tangga sendiri. Lingkungan sosial yang diciptakan bagi “para pendatang dan orang asing” merupakan fungsi hospitalitas yang ramah dan terbuka justru agar para pendatang datang ke pangkuannya, agar para asing tidak serba terasing. Dengan demikian dasar *paroikia* bukanlah perbatasan wilayah dan teritorial, ala hukum kanonik, melainkan *sense of belonging*, citarasa betah, rasa *welcome*, rasa selamat dengan kenyataan datang ke situ.

Wajah Gereja sebagai wajah ramah menandai fungsi cukup unggul dan hakiki dari *paroikia*, dan, apalagi keramah-tamahan kakak Yesus, tuan rumah para orang berdosa, pemungut cukai dan para papa terlantar. Dalam fungsi *paroikia* demikian, harus diakui bahwa sistem jaringan sosial gerejani di Indonesia sungguh hebat. Kalau tidak ada “keluarga” (“masyarakat saya”) di kota ini, maka selalu ada paroki katolik yang memberi tumpangan kepada orang *paroikia* katolik, karena katolik. Jaringan sosial demikian sungguh mengagumkan.

<sup>38</sup> Elliot, “The Significance and Function of the Household within the Strategy of I Peter,” 165.

<sup>39</sup> Bellah, “All of Use Are Immigrants Spiritually,” 293-295.

Faedah dari perspektif biblis akan *paroikia* begini, untuk topik pemberdayaan komunitas basis, menyangkut masalah fungsi keramahan dan daya terima, daya tampung sosio-personal, secara khusus untuk orang baru, pendatang, dan siapapun non-kita yang terasing dari kelompok komunitas yang bersangkutan, atau malah yang tersingkir dari masyarakat yang lebih luas. Komunitas basis sendiri merupakan suatu tanggapan, jawaban terhadap keterasingan, status marginal, dan keadaan tuna wisma, tuna betah di dunia sosial yang konkret begini.

Komunitas sendiri yang menjadi penengah, makelar secara sosial, bukan hanya advokat, melalui beberapa pembela di depan orang lain. Komunitas basis selaku *home away from home*, “semacam-rumah rasa seperti di rumah sendiri”, merupakan gaya hidup. Komunitas basis langsung terlibat dalam keterasingan, KB(G) menjadi bagian dari jawaban bukan bagian dari masalah. Memberi tumpangan atau menciptakan suasana, arena familiar, bagi orang terasing dan pendatang mungkin merupakan ufuk dan titik lebih jauh. Komunitas basis bisa membayangkan fase ini dalam perkembangannya.<sup>40</sup> Akan tetapi visi biblis tentang nilai *paroikia* sekurang-kurangnya melontarkan bagi kita suatu tolok ukur nan jauh bagi makna hidup bersekutu dan bersetiakawan dengan orang marginal. Di dalam dunia sosial yang semakin tertata bukan melalui format kampung dan desa, melainkan kota dan megalopolis global, maka kita semua menjadi semakin terasing di mana-mana dan seterusnya. Rasa betah bukan lagi suatu pengandaian dari teritorialitas dan rumah orang tua, melainkan suatu *skill* yang kita bina, justru karena kita semua pendatang di tempat terasing ini.

Alur al-kisah dari kitab suci tentang *paroikia*, “berkediaman sementara di tempat keterasingan”, bukan hanya soal kawasan tempat berpijak di bumi, melainkan tempat terasing berpikir di budi. Komunitas-komunitas basis memberi tumpangan kepada anggota-anggotanya – sementara waktu – di mana semua dilatih daya timbangnya dan pengambilan keputusan etis, dan malah keputusan eskatologis. Semua komunitas basis bertujuan memberi tempat dan perwujudan nyata kepada nilai-nilai warga kalasan yang lebih mirip, lebih semisal, lebih serupa dengan “kawasan kesepadanan” (*regions of likeness*) dengan *koinônia* Allah Tritunggal, yang terus-menerus secara kekal, menata budi dan bumi manusia demi memperluas kesanggupan menampung kasih cinta abadi.

Pembinaan sikap *capax dei*, kapasitas untuk hidup semisal mungkin dan serupa dengan Allah itulah, yang mengazaskan semua *koinonia*, semua komunitas basis, semua komunitas gerejani. Sabda memilih kediamannya di antara orangnya sendiri, akan tetapi masyarakatnya sendiri tidak

---

<sup>40</sup> Bellah, “An Inclusive Public,” 295-296.

menampungnya (lht. Joh. 1:11, bdk. Mk. 6:3). Komunitas basis, sebagai tanda persekutuan serupa Allah Persekutuan Tritunggal, sengaja berkiblat kepada persekutuan Allah<sup>41</sup> lebih daripada pola kekerabatan kampung halaman. Namun, juga diharapkan bahwa pola kampung justru menyumbangkan keramah-tamahan yang paling baik kepada orang pendatang dan orang tak serumpun, menjadikan sabda persekutuan dan keramahan menjelma sehingga bagian alkisah kita menjadi Alkisah Allah Peramah.

Upaya pemberdayaan komunitas basis, mau mengedepankan beberapa nilai fundamental yang diperlukan untuk menjalankan himbauan kepada kita dari pertemuan kabar Jubileum, SAGKI dan sidang KWI 2000. Namun pada akhirnya, *deus incrementum dat*: Allah-lah yang memberi pertumbuhan. Pemberdayaan dan insani kita pantau, bisa diperhatikan, dan ditinjau secara berkala. Namum juga *koinonia* Roh Kudus (II Kor. 13: 14) karisma dan pemberian Roh Kudus. Kita mendoakannya.



### Daftar Rujukan

- Adorno, Theodor W. 1979. *Negative Dialectics*. New York: Seabury Press.
- Alinsky, Saul D. 1972. *Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals*. New York: Vintage Books, Random House.
- Aron, Raymond. 1968. *Main Current in Sociological Thought, I-II*. New York: Doubleday achor Book, Garden City.
- Bell, David N. 1984. *The Image and Likeness: The Augustinian Spirituality of William of Saint Thierry*. Kalamazoo: Cistercian Press.
- Bellah, Robert N. 1992. *The Good Society*. New York: Vintage books.
- Bernstein, Richard J. 1971. *Praxis and Action: Contemporary Philosophies of Human Action*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press,.
- Boelaars, Yan. 1984. *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia,.
- Boff, Leonardo. 2000. *Allah Persekutuan*. Ende: LPBAJ.
- Boff, Leonardo. 2000. *Yesus Kristus Pembebas*. Ende: LPBAJ.

---

<sup>41</sup> Boff, *passim*.

- Bond, George D. 1988. "The Arahat: Sainthood in Theravāda Buddhism." Dalam Kieckheffer, Richard & George D. Bond. *Sainthood: Its Manifestation in World Religions*, Berkeley: University of California Press, 140-171.
- Budi Hardiman, F. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta Kanisius.
- Burke, Kenneth. 1965. *Permanence and Change: An Anatomy of Purpose*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Cantor, Norman F. 1993. *The Civilization of the Middle Ages*. New York: Harper Collins Publishers.
- Cassirer, Ernst. 1963. *The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy*. Philadelphia: The University of Pennsylvania Press.
- Clifford, James. 1982. *Person and Myth: Maurice Leenhardt in the Melanesian World*. Berkeley: University of California Press.
- Connerton, Paul. 1978. *Critical Sociology*. Middlesex England: Penguin Books, Harmondsworth.
- Coward, Harold & Toby Foshay (eds.). 1992. *Derrida and Negative Theology*. Albany: SUNY,.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. 2001. *Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (Wisma Kinasih – Caringin – Bogor 1 s/d 5 November 2000)*, dalam *Spektrum* No. 1. (XXIX), Jakarta.
- Elliot, John H. 1990. *A Home for the Homeless: A Social-Scientific Criticism of I Peter, its Situation and Strategy*, Minneapolis: Fortress Press.
- Grube, G.M.A. 1961. *Plato's Thought*, Boston: Beacon Press,.
- Stock, Brian. 1996. *Augustine the Reader: Meditation, Self-Knowledge, and the Ethics of Interpretation*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.
- Feibleman, James K. 1956. *The Institutions of Society*. London: George Allen and Unwin.
- Gay, Peter. 1967. *The Enlightenment: An Intepretation, The Rise of Modern Paganism*. New York: Knopf.
- Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2000, *Gereja yang Mendengarkan: Hasil-hasil Sidang Agung Gereja katolik Indonesia 2000 (1-5 November 2000)*, Jakarta, November 2000.

- Habermas, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press,.
- Hanechen, Ernst. 1966. "The Book of Acts as Source Material for the History of Early Christianity," dalam Leander E. Keck and J. Louis Martyn (eds.), *Studies in Luke-Acts*, The Abingdon Press, Nashville, p. 258-278.
- Hengel, Martin. 1985. *Acts and the History of Earliest Christianity*. Philadelphia: Fortress, Press.
- Hengel, Martin. 1983. *Between Jesus and Paul*. Philadelphia: Fortress Press.
- Jacobs, Tom. 2000. *Koinônia in the Acts of the Apostles*. makalah bagi International Study Day, Bandung.
- Dok-Pen MAWI. 1983. *Konsili Vatikan II. Gaudium et Spes (GS)*. Riberu (Ed.). Jakarta.
- Leenhardt, Maruice. 1979. *Do Kamo: Person and Myth in the Melanesian World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lévy-Bruhl, Lucien. 1966. *Primitive Mentality*. Boston: Beacon Press.
- . 1978. *The Notebooks on Primitive Mentality*. New York: Harper Torchbooks.
- Lippmann, Walter. 1999. *Filsafat Publik: Analisa Seorang Pemikiran Politik Terkemuka atas Tantangan yang Dihadapi Negara-negara Demokratis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lobkowitz, Nicholas. 1967. *Theory and Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx*. South Bend: University of Notre Dame Press.
- Magnis-Suseno, Franz. "Di Tahun 2000 Umat Katolik Indonesia Melihat ke Depan," *Spektrum* XXIX (2001), No. 1, 53-70.
- Marx, Karl. 1975. *Early Writings*. New York: Vintage Book, Random House.
- Meeks, Wayne A. 1983. *The First Urban Christians: the Social World of the Apostle Paul*. New Haven: Yale University Press.
- Nisbet, Robert A. 1969. *The Sociological Tradition*. New York: Macmillan Company.
- Norton, David L. 1976. *Personal Destinies*. New Jersey: Princeton University Press, Princeton.
- Pouwer, Jan & Alexander C. van der Leeden. 1960. "Loosely Structured Societies in New Guinea", dalam *Bijdragen Taal, land en volkenkunder* (Vol 116: No I & III).
- Rogers, Carl. 1951. *Client Centered Therapy*. Boston: Houghton Mifflin.



- Sahlins, Marshall. 1972. *Stone Age Economics*. New York: Aldine.
- Schillebeeckx, Eduard. 1967. "Christian Faith and the Future of the World", dalam *The Church Today*. Group 2000 (ed.), Westminster, Md.: Newman Press, 60-94.
- Stock, Brian. 1996. *Augustine the Reader: Meditation, Self-Knowledge, and the Ethics of Interpretation*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.
- Sugiarto, Bambang. 1996. *Post-Modernism: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thornton, L.S., C.R. 1942. *The Common Life In the Body of Christ*. London, W.I.: Dacre Press: A. and C. Black, Ltd.
- Tönnies, Ferdinand. 1961. *Custom: An Essay on Social Codes*. Chicago Gateway Edition.
- Tracy, David. 1981. "Publicness in Systematic Theology" dalam *The Analogical Imagination: Christian Theology and Culture of Pluralism*, Part I. New York: Crossroad, 1-231.
- Weber, Max. 1946. "Bureaucracy", in Hans H. Gerth and C. Wright Mills (eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press, , 196-244

